

Identifikasi Fungsi Perkotaan Dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Metropolitan Malang

Identification of Urban Function to Support the Development of the Malang Metropolitan Area

Nikolas Arinanda Aprilio Ginting¹, Ibnu Sasongko², Titik Poerwati³

^{1,2,3}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang

Jalan Bendungan Sigura-gura No. 2 Kota Malang 65145, Telp. (0341) 551431, 553015

e-mail : nikolas3404@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: diisi editor

Received in revised form: diisi editor

Accepted on: diisi editor

Available Online: Agustus 2026

Keywords: Fungsi Perkotaan, Delineasi Metropolitan, Struktur Ruang, Metropolitan Malang

Corresponding Author:

Nikolas Arinanda Aprilio Ginting
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Malang
nikolas3404@gmail.com
ORCID ID: -

Abstrak

Pertumbuhan Kota Malang beserta wilayah di sekitarnya, seperti Kota Batu, Lawang, Kepanjen, Turen, dan Tumpang, menunjukkan dinamika urbanisasi yang semakin pesat dengan total jumlah penduduk yang telah memenuhi syarat minimal 1.000.000 jiwa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang untuk dapat dikategorikan sebagai kawasan metropolitan. Namun, hingga saat ini Metropolitan Malang belum ditetapkan secara resmi sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan delineasinya serta bagaimana fungsi-fungsi perkotaan di dalamnya dapat berjalan secara seimbang tanpa menimbulkan ketimpangan dan pemusatan kegiatan yang berlebihan pada kota inti. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah yang termasuk dalam delineasi Metropolitan Malang, mengidentifikasi fungsi eksisting perkotaan di dalamnya, serta merumuskan arahan pengembangan fungsi perkotaan yang seimbang dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed method* yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, serta metode analisis berupa kajian dokumen tata ruang, analisis skala pelayanan berbasis *skoring pakar*, dan interpretasi teori struktur ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Malang berperan sebagai kawasan perkotaan inti dengan fungsi dominan sebagai pusat pendidikan tinggi serta perdagangan dan jasa skala regional hingga nasional, sementara lima perkotaan di sekitarnya berperan sebagai wilayah penyangga dengan fungsi spesifik seperti pariwisata, industri, pemerintahan, serta produksi pertanian. Berdasarkan temuan tersebut, arahan pengembangan Metropolitan Malang diarahkan pada penguatan kemandirian fungsi fasilitas di kota-kota satelit serta peningkatan keterkaitan spasial antarwilayah melalui penyediaan jaringan infrastruktur dan sistem transportasi regional yang terintegrasi, guna mencegah *overcapacity* pada kota inti dan mewujudkan pengembangan kawasan metropolitan yang lebih merata.

Abstract

The development of Malang City and its surrounding areas—such as Batu City, Lawang, Kepanjen, Turen, and Tumpang—demonstrates rapid urbanization dynamics, with a combined population meeting the minimum threshold of one million inhabitants required by Government Regulation No. 26 of 2008 on Spatial Planning to be classified as a metropolitan area. However, the Malang Metropolitan Area has not yet been officially designated, raising questions regarding the feasibility of its delineation and how urban functions within it can operate in a balanced manner without causing inequality or excessive concentration of activities in the core city. This study aims to identify the areas included in the Malang Metropolitan delineation, identify the existing urban functions within them, and formulate directions for balanced and sustainable

urban function development. A mixed-methods approach combining qualitative and quantitative analysis was employed, using primary and secondary data collection together with spatial-plan document review, expert-scoring based service-scale analysis, and interpretation through spatial-structure theory. The results indicate that Malang City serves as the core urban area, with dominant functions as a hub for higher education and regional-to-national scale trade and services, while the five surrounding urban areas act as buffer zones with specific functions such as tourism, industry, government administration, and agricultural production. Based on these findings, development directions for the Malang Metropolitan Area focus on strengthening the functional self-reliance of satellite cities and enhancing spatial connectivity between regions through integrated infrastructure networks and regional transportation systems, in order to prevent overcapacity in the core city and achieve more equitable metropolitan development.

1. Pendahuluan

Perencanaan wilayah dan kota merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan pertumbuhan suatu kawasan agar berjalan secara terkendali dan berkelanjutan. Penataan ruang, sebagai suatu sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, menegaskan bahwa pemanfaatan ruang merupakan upaya mewujudkan struktur dan pola ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan [1]. Ukuran suatu kawasan perkotaan pada dasarnya tidak semata ditentukan oleh jumlah penduduk atau luas wilayah administratifnya, melainkan juga oleh kompleksitas fungsi yang dijalankan serta intensitas keterkaitan sosial-ekonomi antarwilayah yang terbentuk di dalamnya. Semakin tinggi intensitas interaksi tersebut, semakin besar pula potensi kota inti untuk menjadi pusat pertumbuhan yang mendorong dinamika pembangunan pada kota-kota satelit di sekitarnya, sementara kota-kota satelit tersebut memberikan kontribusi balik berupa tenaga kerja, bahan baku, dan ruang aktivitas baru bagi kota induk. Pola saling ketergantungan inilah yang melandasi terbentuknya sistem metropolitan, yaitu kesatuan wilayah yang terdiri atas beberapa kawasan perkotaan dengan keterkaitan fungsional dan spasial yang kuat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang, suatu kawasan dapat dikategorikan sebagai kawasan metropolitan apabila memenuhi tiga prasyarat utama, yaitu memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 jiwa, terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan, serta terdapat keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan di dalam satu sistem metropolitan [2]. Perkotaan inti berperan sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan di sekitarnya, sedangkan kawasan perkotaan sekitar berfungsi sebagai penyeimbang perkembangan kawasan inti. Pada praktiknya, tidak sedikit kawasan metropolitan di Indonesia yang mengalami ketimpangan akibat pemusatan kegiatan yang berlebihan pada kota inti, sehingga kajian mengenai karakteristik dan distribusi fungsi perkotaan pada suatu sistem metropolitan menjadi penting untuk dilakukan sebelum delineasi maupun arahan pengembangannya dirumuskan.

Fenomena tersebut tercermin pada perkembangan Kota Malang beserta wilayah di sekitarnya, seperti Kota Batu, Lawang, Kepanjen, Turen, dan Tumpang, yang menunjukkan dinamika urbanisasi yang semakin pesat sebagai pusat kegiatan pendidikan, pariwisata, dan industri. Jumlah penduduk gabungan Kota Malang dan wilayah sekitarnya telah melampaui ambang 1.000.000 jiwa sebagaimana disyaratkan bagi kawasan metropolitan, namun hingga saat ini Metropolitan Malang belum ditetapkan

secara resmi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kelayakan delineasi wilayahnya serta bagaimana fungsi-fungsi perkotaan di dalamnya dapat berjalan secara seimbang tanpa menimbulkan pemusatan kegiatan yang berlebihan pada kota inti.

Secara konseptual, fungsi perkotaan menurut Yunus [3] merupakan konsep yang bersifat abstrak dan dapat dijabarkan melalui delapan kategori utama, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, Transportasi, Industri, Pariwisata, serta Sosial Budaya. Adapun jangkauan pelayanan suatu fungsi perkotaan dapat dijelaskan melalui Teori Tempat Sentral (Central Place Theory), yang mengemukakan bahwa pusat pelayanan dengan hierarki lebih tinggi memiliki jangkauan pelayanan (range) dan ambang batas penduduk pendukung (threshold) yang lebih luas dibandingkan pusat pelayanan pada hierarki di bawahnya [4]. Kerangka ini banyak digunakan dalam kajian mengenai keterkaitan fungsional kota inti dan kota satelit pada berbagai kawasan metropolitan di Indonesia, seperti pada kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila yang menempatkan Kota Surabaya sebagai perkotaan inti [5], maupun pada kawasan metropolitan PEKANSIKAWAN yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fungsional kota satelit sangat bervariasi bergantung pada kelengkapan dan hierarki fasilitas pelayanan yang dimilikinya [6].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (a) mengidentifikasi wilayah yang termasuk dalam delineasi Metropolitan Malang, (b) mengidentifikasi fungsi eksisting perkotaan di dalamnya, dan (c) merumuskan arahan pengembangan fungsi perkotaan yang seimbang dan berkelanjutan bagi kawasan tersebut.

2. Metode Penelitian

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif [7]. Pendekatan kuantitatif diterapkan pada tahap pengukuran skala pelayanan fungsi perkotaan melalui scoring pakar, sedangkan pendekatan kualitatif diterapkan pada tahap interpretasi hasil identifikasi fungsi serta perumusan arahan pengembangan wilayah. Kombinasi kedua pendekatan tersebut dipilih karena kekuatan salah satu pendekatan dapat menutup kelemahan pendekatan yang lain, sekaligus memberikan bukti yang lebih komprehensif dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2.2 Metode Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel

Data dikumpulkan melalui survei sekunder dan survei primer. Survei sekunder dilakukan melalui telaah dokumen rencana tata ruang, meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Malang, RDTR Kota Batu, RTRW Kabupaten Malang, RDTR Kepanjen, dan RDTR Tumpang, untuk mengidentifikasi fungsi kawasan serta lokasi peruntukan fasilitas pada masing-masing perkotaan. Survei primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara untuk memverifikasi kesesuaian antara rencana tata ruang dengan kondisi eksisting, serta kuesioner kepada tenaga ahli dari unsur pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi guna memvalidasi skala pelayanan tiap fasilitas.

Penentuan sampel fasilitas dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pembatasan sampel secara sengaja hanya pada fasilitas dengan hierarki atau tipe tertinggi yang tersedia di masing-masing perkotaan untuk tiap-tiap dari delapan fungsi perkotaan yang diteliti. Pembatasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa fasilitas dengan hierarki tertinggi paling representatif dalam menggambarkan kapasitas pelayanan maksimum suatu wilayah, sejalan dengan prinsip Teori Tempat

Sentral yang menyatakan bahwa pusat pelayanan hierarki tinggi memiliki jangkauan dan ambang batas penduduk pendukung yang lebih luas [4]. Apabila pada satu fungsi ditemukan lebih dari satu fasilitas pada hierarki tertinggi yang sama, seluruh fasilitas tersebut turut dicatat sebagai bagian dari sampel, karena keragaman jumlah fasilitas turut mencerminkan kekuatan fungsi perkotaan pada wilayah yang bersangkutan. Kriteria operasional yang digunakan untuk menentukan fasilitas representatif pada tiap fungsi perkotaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel Perwujudan Fungsi Perkotaan

Fungsi Perkotaan	Kriteria Penentuan Sampel (Hierarki Tertinggi)
Pendidikan	Perguruan Tinggi (Universitas/Institut/Politeknik); apabila tidak tersedia, digunakan jenjang SMA/SMK sebagai proksi.
Kesehatan	Rumah Sakit dengan klasifikasi kelas tertinggi yang tersedia di wilayah tersebut (Kelas A, B, C, atau D).
Pemerintahan	Kantor pusat pemerintahan dengan skala administrasi tertinggi (Kantor Wali Kota/Bupati).
Perdagangan & Jasa	Pusat perbelanjaan modern (mal) dan/atau pasar dengan skala pelayanan terluas sesuai peruntukan RDTR.
Transportasi	Prasarana transportasi dengan tipe/kelas tertinggi (stasiun kereta api kelas besar, terminal Tipe A/B/C).
Industri	Kawasan atau fasilitas industri berskala nasional.
Pariwisata	Objek wisata berstatus kawasan/pusat pariwisata dalam RDTR; jumlah kunjungan wisatawan sebagai kriteria tambahan.
Sosial Budaya	Fasilitas dengan tipe/skala tertinggi (GOR Tipe A, alun-alun kota, pusat kegiatan budaya/kreatif kota).

Sumber: Kajian Penulis, 2026

2.3 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan untuk menjawab ketiga sasaran penelitian. Tahap pertama adalah identifikasi fungsi eksisting perkotaan, yang dilakukan dengan mencocokkan hasil kajian rencana tata ruang dengan hasil observasi lapangan pada setiap perkotaan yang masuk ke dalam delineasi Metropolitan Malang.

Tahap kedua adalah analisis skala pelayanan fungsi perkotaan, yang dilakukan melalui skoring oleh tenaga ahli dengan kategori skala Lokal (skor 1), Regional (skor 2), dan Nasional (skor 3) mengacu pada klasifikasi pusat pelayanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 [2]. Nilai rata-rata setiap fasilitas dihitung dengan persamaan berikut, dengan NP merupakan nilai yang diberikan oleh masing-masing tenaga ahli:

$$\bar{X}_{fasilitas} = (NP1 + NP2 + NP3) / 3 \quad (1)$$

Nilai agregat pada tingkat fungsi kemudian dihitung dengan merata-ratakan seluruh fasilitas dalam kelompok fungsi yang sama, dengan k merupakan jumlah fasilitas dalam kelompok fungsi tersebut:

$$\bar{X}_{fungsi} = (\sum \bar{X}_{fasilitas}) / k \quad (2)$$

Untuk mengategorikan nilai rata-rata fungsi perkotaan ke dalam kelas skala pelayanan, digunakan panjang interval kelas berikut, dengan nilai minimum 1,00, nilai maksimum 3,00, dan jumlah kelas 3:

$$i = (Maks - Min) / k \quad (3)$$

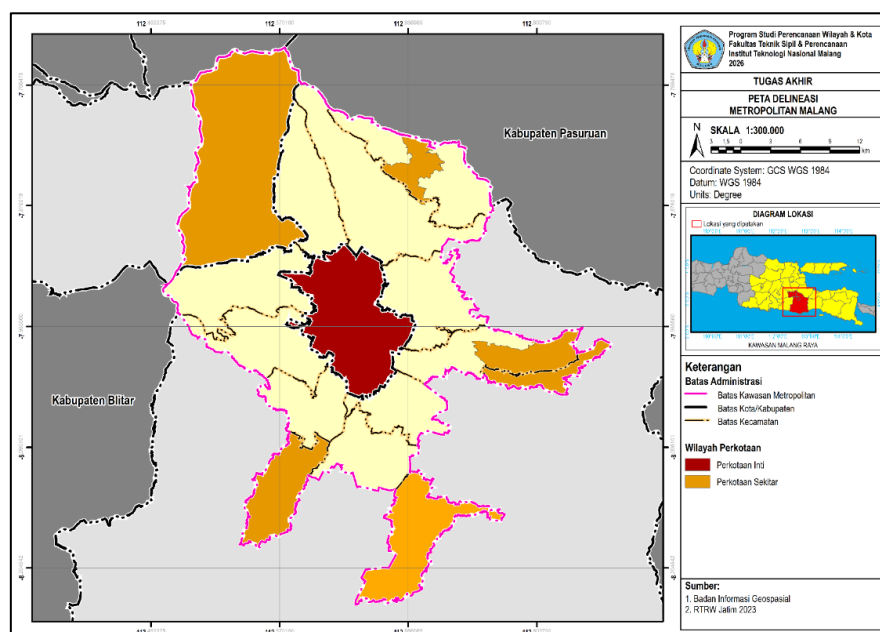
Perhitungan tersebut menghasilkan nilai interval sebesar 0,67, sehingga skala pelayanan fungsi perkotaan terbagi menjadi tiga kelas, yaitu Lokal (1,00–1,66), Regional (1,67–2,33), dan Nasional (2,34–3,00).

Tahap ketiga adalah analisis arahan pengembangan wilayah metropolitan, yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan hasil identifikasi dan skoring fungsi perkotaan ke dalam kerangka Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole Theory) oleh Perroux [8] untuk mengidentifikasi perkotaan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan; Model Pusat-Pinggiran (Core-Periphery Model) oleh Friedmann [9] untuk mengklasifikasikan tingkat kemandirian fungsional kawasan periferi terhadap kawasan inti; serta prinsip pengembangan wilayah yang menekankan pentingnya spesialisasi peran pada tiap simpul kawasan dibandingkan penyeragaman seluruh fungsi pada setiap perkotaan (Alkadri, 1999).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Delineasi Metropolitan Malang

Merujuk pada RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023–2043, Kota Malang ditetapkan berstatus Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sehingga berkedudukan sebagai kawasan perkotaan inti dalam sistem Metropolitan Malang, sejalan dengan pola delineasi yang diterapkan pada kawasan metropolitan lain di Jawa Timur, seperti Metropolitan Gerbangkertosusila yang menempatkan Kota Surabaya sebagai perkotaan inti [5]. Kawasan perkotaan sekitar ditetapkan berdasarkan status Pusat Kegiatan Lokal (PKL) pada RTRW Provinsi Jawa Timur, yang meliputi Kota Batu serta empat kawasan perkotaan di Kabupaten Malang, yaitu Perkotaan Lawang, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Turen, dan Perkotaan Tumpang. Dengan demikian, kawasan Metropolitan Malang teridentifikasi terdiri atas satu perkotaan inti dan lima perkotaan sekitar sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Peta 1 Delineasi Metropolitan Malang

Sumber: Analisis, 2026

3.2 Identifikasi Fungsi Eksisting Perkotaan

Identifikasi fungsi perkotaan dilakukan terhadap delapan kategori fungsi menurut Yunus [3]. Hasil pencocokan dokumen rencana tata ruang dengan kondisi lapangan menunjukkan bahwa Perkotaan

Malang dan Perkotaan Batu memiliki fungsi paling lengkap, yaitu tujuh dari delapan fungsi yang diteliti, diikuti Perkotaan Kepanjen dengan enam fungsi, Perkotaan Lawang dengan lima fungsi, Perkotaan Turen dengan empat fungsi, serta Perkotaan Tumpang dengan tiga fungsi. Perkotaan Malang secara konsisten menjalankan fungsi pusat pelayanan pendidikan tinggi serta perdagangan dan jasa berskala regional hingga nasional, sementara perkotaan-perkotaan di sekitarnya berperan sebagai wilayah penyangga dengan kekhasan fungsi masing-masing, yaitu pariwisata pada Batu dan Tumpang, industri pada Lawang dan Turen, serta pemerintahan pada Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang.

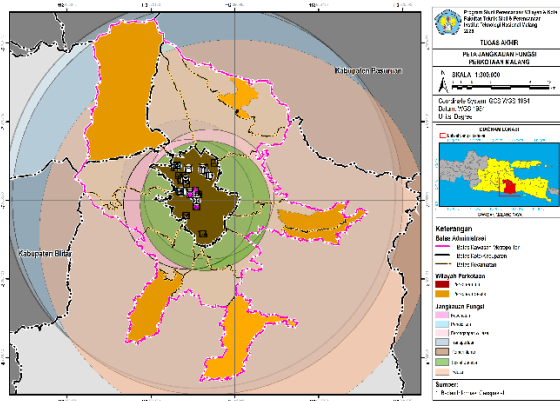
Hasil skoring oleh tenaga ahli terhadap jangkauan pelayanan tiap fasilitas menunjukkan bahwa Perkotaan Malang memperoleh skor fungsi tertinggi (2,20) dengan skala pelayanan agregat Regional, meskipun fungsi pendidikan tinggi dan industri di dalamnya secara individual telah menjangkau skala nasional. Perkotaan Batu, Lawang, dan Kepanjen memperoleh skor pada kisaran 1,90 hingga 2,10 dengan skala pelayanan Regional, sedangkan Perkotaan Turen memperoleh skor 1,79 dan Perkotaan Tumpang memperoleh skor terendah (1,33) dengan skala pelayanan Lokal. Ringkasan hasil identifikasi dan skoring fungsi perkotaan pada keenam kawasan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Analisis Identifikasi Fungsi Perkotaan Metropolitan Malang

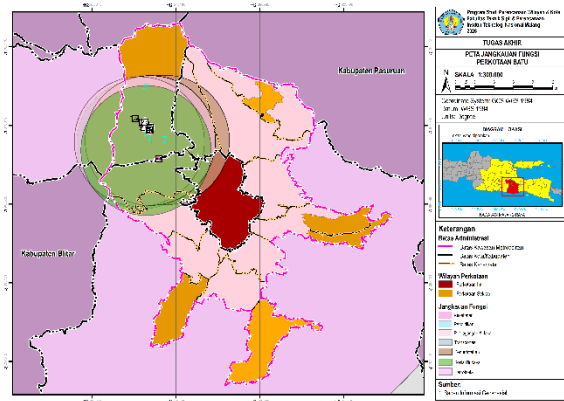
Perkotaan	Jumlah Fungsi Teridentifikasi	Skor Fungsi Perkotaan	Skala Pelayanan	Posisi dalam Struktur Ruang
Malang	7 dari 8 fungsi	2,20	Regional	Core (Kutub Pertumbuhan)
Batu	7 dari 8 fungsi	2,10	Regional	Periferi Tingkat I
Lawang	5 dari 8 fungsi	2,00	Regional	Periferi Tingkat I
Kepanjen	6 dari 8 fungsi	1,90	Regional	Periferi Tingkat I
Turen	4 dari 8 fungsi	1,79	Regional	Periferi Tingkat II
Tumpang	3 dari 8 fungsi	1,33	Lokal	Periferi Terlemah

Sumber: Analisis peneliti, 2026

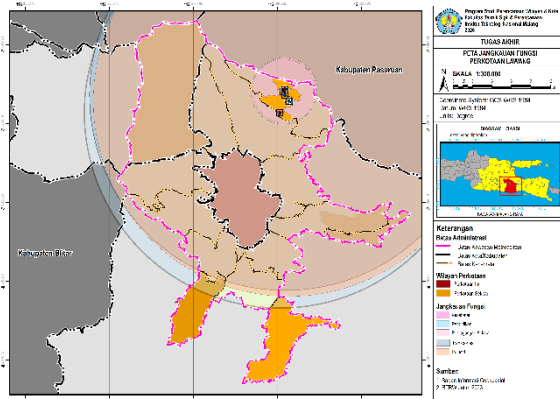
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa jumlah fungsi yang teridentifikasi pada suatu perkotaan tidak selalu berbanding lurus dengan skor akhirnya. Perkotaan Lawang misalnya, dengan hanya lima dari delapan fungsi, mampu memperoleh skor yang setara dengan Perkotaan Kepanjen yang memiliki enam fungsi, karena fasilitas industri di Lawang menjangkau skala pelayanan nasional. Kondisi ini konsisten dengan prinsip hierarki pelayanan pada Teori Tempat Sentral [4], yang menegaskan bahwa skor akhir suatu fungsi perkotaan lebih ditentukan oleh hierarki dan jangkauan pelayanan fasilitas dibandingkan semata jumlah fungsi yang dimiliki suatu wilayah.



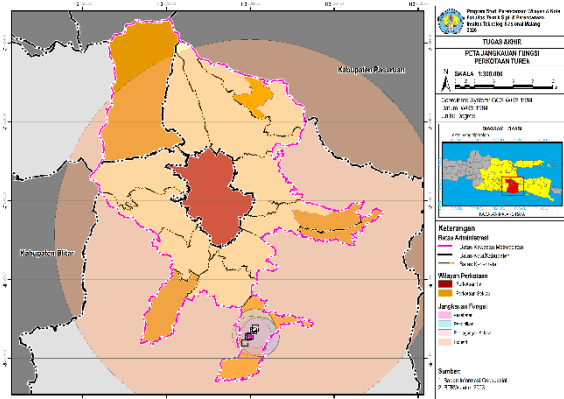
Peta 2 Peta Jangkauan Fungsi Perkotaan Malang



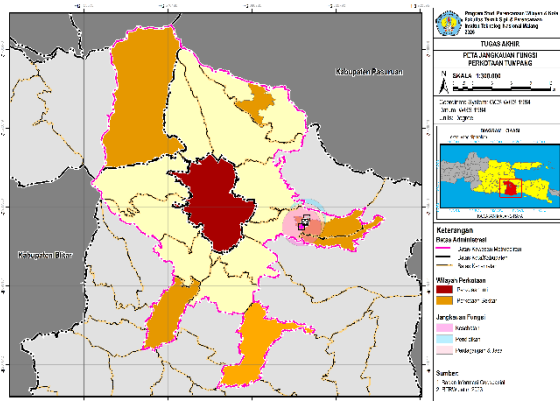
Peta 3 Peta Jangkauan Fungsi Perkotaan Batu



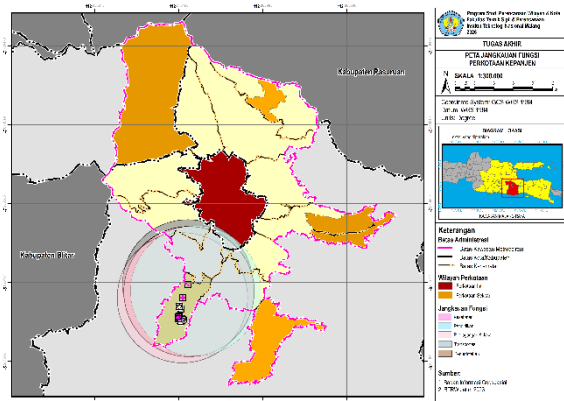
Peta 4 Peta Jangkauan Fungsi Perkotaan Lawang



Peta 5 Peta Jangkauan Fungsi Perkotaan Turen



Peta 6 Peta Jangkauan Fungsi Perkotaan Tumpang



Peta 7 Peta Jangkauan Fungsi Perkotaan Kepanjen

3.3 Arahan Pengembangan Fungsi Perkotaan

Berdasarkan Teori Kutub Pertumbuhan, Perkotaan Malang dengan kelengkapan fungsi dan skor tertinggi diposisikan sebagai kutub pertumbuhan (growth pole) yang berpotensi menyebarkan pengaruh pertumbuhannya (spread effect) ke perkotaan-perkotaan di sekitarnya [8]. Berdasarkan Model Pusat-Pinggiran, kelima perkotaan lainnya diposisikan sebagai wilayah periferi dengan tingkat kemandirian fungsional yang berjenjang [9]: Batu, Lawang, dan Kepanjen sebagai periferi tingkat I yang relatif mandiri secara fungsional; Turen sebagai periferi tingkat II; serta Tumpang sebagai periferi dengan tingkat ketergantungan tertinggi terhadap kawasan inti.

Mengacu pada prinsip pengembangan wilayah yang menekankan spesialisasi peran antarsimpul kawasan (Alkadri, 1999), arahan pengembangan disusun agar tidak menyeragamkan seluruh fungsi pada setiap perkotaan. Perkotaan Malang diarahkan murni sebagai pusat inti pendidikan tinggi, industri kreatif, serta perdagangan dan jasa, dengan pengendalian urban sprawl melalui pembangunan vertikal dan integrasi Stasiun Malang Kotabaru ke dalam sistem transit-oriented development (TOD) sebagai distributor komuter utama. Perkotaan Batu diarahkan sebagai kawasan pariwisata alam dan buatan dengan pembatasan ketat alih fungsi lahan pada sabuk hijau lereng. Perkotaan Lawang dan Turen diarahkan pada penguatan fungsi industri pengolahan disertai peningkatan konektivitas logistik dan transportasi komuter menuju kota inti. Perkotaan Kepanjen diarahkan pada penguatan fungsi pemerintahan dan fasilitas kesehatan tipe A/B sebagai simpul selatan, sedangkan Perkotaan Tumpang diarahkan pada penguatan fungsi dasar (pendidikan, kesehatan, serta perdagangan dan jasa) guna mengoptimalkan perannya sebagai pintu gerbang wisata menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Secara keseluruhan, arahan pengembangan tersebut ditujukan untuk memperkuat kemandirian fungsi fasilitas di kota-kota satelit serta meningkatkan keterkaitan spasial antarwilayah melalui penyediaan jaringan infrastruktur dan sistem transportasi regional yang terintegrasi, guna mencegah overcapacity pada kota inti dan mewujudkan pengembangan Kawasan Metropolitan Malang yang lebih merata.

4. Kesimpulan

- Kawasan Metropolitan Malang teridentifikasi terdiri atas Kota Malang sebagai perkotaan inti berstatus Pusat Kegiatan Nasional, didukung oleh lima perkotaan sekitar berstatus Pusat Kegiatan Lokal, yaitu Kota Batu, Perkotaan Lawang, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Turen, dan Perkotaan Tumpang.
- Fungsi eksisting perkotaan menunjukkan adanya spesialisasi peran antarwilayah: Perkotaan Malang dominan pada fungsi pendidikan tinggi serta perdagangan dan jasa skala regional–nasional, sedangkan perkotaan-perkotaan sekitar berfungsi sebagai penyeimbang beban kota inti melalui fungsi pariwisata, industri, pemerintahan, serta produksi pertanian sesuai potensi masing-masing wilayah.
- Arahan pengembangan fungsi perkotaan Metropolitan Malang diarahkan pada penguatan kemandirian fungsi fasilitas di kota-kota satelit serta peningkatan keterkaitan spasial antarwilayah melalui jaringan infrastruktur dan sistem transportasi regional yang terintegrasi, guna mencegah pemusatan kegiatan yang berlebihan pada kota inti.

5. Saran

Penelitian lanjutan disarankan untuk menambahkan variabel analisis keterkaitan ekonomi antarwilayah, seperti analisis input-output atau model pergerakan matriks asal-tujuan (origin-destination), guna memperlihatkan tingkat ketergantungan riil antarfungsi perkotaan di dalam sistem Metropolitan Malang secara lebih kuantitatif. Selain itu, kajian lanjutan mengenai pemantauan dinamis skala pelayanan fungsi perkotaan juga diperlukan seiring dengan pembaruan dokumen rencana tata ruang di masing-masing wilayah administrasi, serta studi komparatif dengan kawasan metropolitan lain di Indonesia untuk memperkaya rumusan kriteria delineasi metropolitan yang saat ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT. dan Ir. Titik Poerwati, MT. selaku dosen pembimbing, serta Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Malang, atas dukungan yang diberikan selama penelitian ini berlangsung.

Daftar Pustaka

- [1] Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [2] Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- [3] Yunus, H.S. 2005. Klasifikasi Kota. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- [4] Christaller, W. 1966. Central Places in Southern Germany. Prentice-Hall: New Jersey.
- [5] Indonesia. 2022. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- [6] Nurrady, T.I., Dewanti, D., & Herwangi, Y. 2020. Tingkat keterkaitan fisik kota inti dan kota satelit di kawasan metropolitan PEKANSIKAWAN (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan). Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 15(1), 119–138.
- [7] Creswell, J.W. 2014. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications: California.
- [8] Perroux, F. 1955. Note sur la notion de pôle de croissance. Economie Appliquée, 8, 307–320.
- [9] Friedmann, J. 1966. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. MIT Press: Cambridge.